

POLITIK BUDAYA TERHADAP MASSA APUNG

STUDI KASUS: PESANTREN TRADISIONAL

JAMIATUN BANTEN

Ulfah Fajarini

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: ulfah_fajarini@yahoo.com

Abstract

Purpose of this article is pesantren in political constellation in indonesia, especially about cultural politic to floating mass, case study traditional pesantren Jamiatun, Tangerang Banten. To collect field data, qualitative method was used by implementing participatory observation, in depth interview and library research. Investigation result is: relation between kiai and santri in Pesantren Jamiatun (PJ) is patron client. the interpretation and the use of religious doctrines in the PJ are carried out intensively and continuously in a quite long period by the religious elites so that conditions are established to facilitate the merger of the religious heavenly idealism of the followers and the idealism and the interest, of the elites which include some practical worldly political interest. In this research the pesantren was studied as phenomena of its kind which function as a floating mass in a culture political.

مستخلص

تبحث هذه المقالة إلى دراسة القسم الداخلي (الباستتيرين أو المعهد) في كوكبته السياسية بإندونيسيا، وبخاصة دراسة عن سياسة ثقافية للجمهور العائم، وهي دراسة حالة في معهد "الإحسان" السلفي الواقع بتانجراينج باتن. تتبع الباحثة في جمع البيانات الميدانية منهجا وأسلوبا كيفيا، وهو الملاحظة بالمشاركة والمقابلة الشخصية المتعمقة والدراسات المكتبية. ووصلت الباحثة إلى نتيجة مفادها أن العلاقة بين شيخ المعهد (الكياهي) والطلاب في هذا المعهد هي علاقة راعي العميل (patron client). وأساس التعاليم الإسلامية التي اعتمدوا عليها مبني على الطاعة والالتزام بما قاله الشيخ، وهذا الأساس قد أدى بكل حرية إلى تحكّم النخبة من رجال الدين وعلمائه من المعهد بالجمهور والمهيمنة

عليه. وإنهم قاموا بالتفسير واستخدام التعاليم الدينية بشكل مكثف وعلى المدى الطويل، مما يصبح الطلاب متعودين على غاياتهم الأخروية، وقد وُجِّهوا إلى مصالح سياسية عملية لدى نخبة من رجال الدين. وهذا الوضع يجعل جماعة من الطلاب عند رأي الباحثة - بمثابة جمهور عائم.

Keywords: Agama, Politik, Massa Apung dan Jamihtun Banten.

A. Pendahuluan

Penelitian ini mengenai pesantren dalam kontelasi politik di Indonesia, khususnya tentang politik budaya terhadap massa apung, studi kasus pesantren tradisional Jamihtun yang terletak di Tangerang Banten. Kajian ini memusatkan perhatian pada gejala agama dan kekuasaan, dinamika di antara keduanya, dan memahaminya dalam konteks konsep kekuasaan dalam antropologi, dengan fokus kajian Pesantren Jamihtun¹ (selanjutnya disingkat PJ), Tangerang, Banten.

Asumsi dasar penelitian ini adalah: *pertama*, doktrin-doktrin agama Islam, selain digunakan untuk memahami Al-Quran dan Hadis dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga terkadang ditafsirkan dan digunakan oleh elit agama Islam tertentu terhadap santrinya, demi memantapkan dan memperkuat kekuasaan elit agama bagi memperkuat posisi mereka untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. *Kedua*, penafsiran dan penggunaan doktrin-doktrin agama tersebut dilakukan secara intensif dan berjangka panjang oleh elit agama sehingga jemaah terkondisi di antara ideal-ideal *ukhrawi* (tujuan keakhiratan) mereka, tetapi terkadang juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik praktis para elit agama tertentu, yang kondisi ini memposisikan jemaah sebagai apa yang sebut sebagai massa apung.

Agama dalam penelitian ini - yang menjadi fokus kajian melalui kasus PJ Tangerang, Banten - adalah gejala yang dipilih untuk mendiskusikan masalah penelitian tersebut karena teori-teori antropologi dan sosiologi secara tradisional menunjukkan adanya kaitan erat antara kekuasaan dan agama dalam konteks politik lokal maupun nasional.²

¹ Berdasarkan etika penelitian, nama pesantren adalah samaran, lihat Kamato Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), hal.103.

² Roland Robertson, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*, terj. A.F.Saifuddin, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1990), hal 37.

Kedua hal tersebut di atas menjadi titik tolak diskusi analitis dalam tulisan ini. Mencermati kasus PJ ini secara teoritis – ditemukan bahwa yang terjadi adalah terwujudnya hubungan-hubungan kekuasaan – yakni supra ordinat (atasan) dan sub ordinat (bawahan) antara Kiai di satu pihak sebagai supraordinat, dan santri sebagai sub ordinat. Sebagai doktrin inti dalam proses sosialisasi sub-ordinasi ini adalah prinsip keagamaan *sami'na wa atho'na* [(kami) mendengar, (kami) taat] terutama terhadap guru dalam hal ini kiai] yang berasal dalam doktrin agama Islam tertentu.

Dalam penelitian ini santri merupakan instrumen dalam proses yang disebut politik budaya massa apung. Masa apung digunakan hanya sebagai istilah. Istilah “massa apung” di bangun dengan tujuan: *Pertama*, untuk menyebut santri yang dalam kenyataan kurang kritis – atau selalu bersikap menerima, menyerap, tanpa bertanya – dalam forum-forum pertemuan kelas. *Kedua*, untuk menyebut para santri yang dalam kenyataan dibawa sebagai instrumen ke berbagai panggung politik lokal maupun nasional, yang kadang-kadang membawa panji-panji partai politik tertentu.

Istilah massa apung dipengaruhi oleh istilah yang sama yang digunakan oleh Hans-Dieter Evers³ untuk menyebut golongan miskin di Jakarta. Dalam konteks tersebut, Evers menyebut orang miskin di Jakarta yang sangat banyak jumlahnya itu sebagai orang-orang yang tidak memiliki orientasi tunggal, sangat disibukkan oleh kepentingan subsistensi ekonomi. Kondisi mereka yang miskin itu sangat rentan untuk dipergunakan oleh kelompok elit politik demi kepentingan politik tertentu karena kebutuhan ekonomi cepat mengakibatkan massa ini gampang dibawa ke arah tertentu oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Meski digunakan untuk menyebut kaum miskin di perkotaan dalam kaitannya dengan kerentanan digunakan oleh kepentingan politik tertentu, istilah ini ternyata berlaku juga untuk menyebut gejala penggunaan politik dalam konteks yang berbeda. Orientasi ketaatan dan kepatuhan yang dibentuk oleh elit agama menyebabkan santri PJ ini, memiliki ciri-ciri yang mirip dengan massa apung dalam konteks kemiskinan kota dari Evers . Meski tidak memiliki orientasi subsistensi ekonomi, massa apung juga memiliki orientasi keuntungan non-ekonomis, yakni ganjaran surgawi, pahala, penilaian tinggi di mata Tuhan, dan lain-lain dalam keagamaan.

³ Hans, Dieter Evers, “Produksi Subsistensi dan ‘Masa Apung’ Jakarta” dalam *Masalah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Penyut.Koentjaraningrat. (Jakarta: LP3ES, 1982), hal.67-69.

Mereka tidak memiliki orientasi tunggal, massa ini gampang dibawa ke arah tertentu oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti PJ bergabung dengan anggota ribuan santri lainnya atau anggota majlis taklim lainnya mengikuti tabligh akbar yang diselenggarakan oleh partai-partai politik, atau ikut aktif dalam kegiatan salah satu calon gubernur dan pilkada lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan interpretivisme simbolik. Pendekatan ini dipandang mampu mengakomodasi kepentingan penelitian ini karena simbol, sebagai pembawa makna, diperlakukan dalam rentang yang luas, tidak hanya benda, gejala, gerak-gerik, dan kelakuan, melainkan juga teks, dokumen, ornamen, susunan kelompok jemaah ritual, hingga ucapan bahasa. Luasnya rentang keberlakuan simbol tersebut memungkinkan untuk memasuki wilayah simbol seperti penggunaan dan pengekspresian bahasa, teks-teks doktrin agama, ornamen-ornamen ritual, pengorganisasian penganut agama dalam ritual, dan sebagainya.

Studi yang melihat agama dari perspektif doktrin yang normatif dilakukan oleh para ahli agama atau teolog. Namun, agama juga dapat dijadikan suatu sasaran studi dengan menggunakan perspektif lain seperti antropologi dan sosiologi. Dengan kata lain, agama dapat dilihat dengan pendekatan interpretivisme, salah satu pendekatan yang penting dalam antropologi masa kini.

Penggunaan simbol berarti memosisikannya sebagai dialog antara ideal dan aktual, antara gagasan dan keyakinan dengan kelakuan. Dalam proses dialog bolak-balik tersebut, simbol sebagai pembawa makna, memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan dan wawancara secara maksimal sehingga menghasilkan deskripsi tebal (*the thick description*) sebagaimana dikemukakan C.Geertz⁴ *The Interpretation of Cultures*.

Antropologi politik secara tradisional memandang kekuasaan sebagai suatu yang mengejauantah dalam otoritas, sehingga para antropolog biasanya tidak memisahkan kekuasaan dari otoritas. Dalam penelitian ini memandang kekuasaan dari perspektif Michlel Foucault⁵ yaitu kekuasaan sebagai proses produksi dan reproduksi kebudayaan oleh para pelaku, yang proses tersebut membangun struktur-struktur dinamik yang mendefinisikan dan mengabsahkan posisi-posisi para pelaku yang terlibat. Kekuasaan dalam pengertian ini mensyaratkan adanya

⁴ Clifford Geertz. *The Interpretation of Culture: Selected Essays*.(New York: Basic Books.,973) pp 76.

⁵ M.Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interview and Other Writings 1972 - 1977*. Terj. C. Gordon. (New York: Pantheon, 1978),pp 65.

lebih dari satu pihak yang berhadapan satu sama lain, saling mengembangkan taktik dan siasat jangka pendek, maupun strategi jangka panjang, suatu proses yang disebut kontestasi.

Pesantren Jamihtun yang diteliti dipandang sebagai arena proses pembelajaran kebudayaan yang analog dengan institusi pendidikan – meminjam istilah P. Bourdieu⁶. Institusi pembelajaran ini merupakan jembatan untuk membicarakan, memahami, dan menyerap budaya baru yang diproduksi di dalam struktur. Bourdieu, memandang PJ sebagai institusi pembelajaran kebudayaan melalui “kekerasan” simbolik untuk melegitimasi tatanan sosial yang berlaku. “Kekerasan” simbolik di dalam PJ tersebut bersifat halus, melalui tata-cara dan teknik persuasif namun penuh ancaman, dan mampu meredam potensi resistensi, dan bertujuan membangun konformitas di kalangan para santrinya. Para santri menerima semua pendapat kiai dengan kesadaran penuh, tanpa ada resistensi, dan mereka menganut pemahaman *sami'na wa atho'na* [(kami) mendengar, (kami) taat] terhadap kiaiinya.

Dalam konteks pesantren, bertujuan mengetahui dan memahami jaringan-jaringan makna yang hadir di balik kompleks simbol-simbol yang diwujudkannyanya. Pesantren adalah arena di mana konteks-konteks agama dibangun untuk menjadikan makna-makna simbolik yang hadir diterima secara masuk akal oleh para santri. Kiai menyampaikan doktrin-doktrin agama melalui bahasa, ungkapan, kelakuan, dan ekspresinya, untuk meyakinkan jemaah yang hadir akan kebenarannya. Dalam arena ini dibangun dialektika antara kehadiran ahli agama (kiai), ungkapan bahasa, ekspresi kelakuan, teks-teks kitab suci Al Quran, ornamen-ornamen. yang secara menyeluruh menciptakan suatu aura kesakralan, yang menyelimuti dunia sosial dengan keilahian yang tertinggi, yang menjadikan yang tidak nyata seolah nyata.

Pendekatan simbol dalam antropologi berkembang dari simbolisme yang berakar dalam struktural-fungsionalisme klasik. Dalam pendekatan ini agama dipandang sebagai inti kebudayaan, sebagai sumber etos dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu C.Geertz⁷ dan V.Turner⁸ menegaskan bahwa secara metodologis ritual adalah cermin dari struktur masyarakat sehingga kajian mengenai suatu masyarakat dapat melalui ritual sebagai satuan pengamatan (satuan penelitian).

⁶ P, Bourdieu, *The Field of Cultural Production*,(Oxford: Polity Press,1993).pp.79.

⁷ Clifford, Geertz. “Religion as a Cultural System,” *Anthropological Approaches to the Study of Religion*. M.Banton, ed..(ASA Monogra London : Tavistock, 1966), pp 40.

⁸ V.W. Turner, *The Ritual Process*. (Chicago: Aldine Publishing,1962).pp.57.

Banyak penelitian mengenai masyarakat dan kebudayaan pada masa lalu dilakukan dengan menggunakan ritual sebagai pusat perhatian, antara lain kajian mengenai agama Jawa untuk memahami masyarakat dan kebudayaan Jawa oleh C.Geertz.⁹

Secara metodologis hubungan supra ordinat (kiai) dan sub ordinat (santri) dapat dipandang sebagai isu pengendalian sosial yang bertujuan memelihara harmoni sistem di mana otoritas menjadi sentral pengendalian, yang kalau dibaca dalam konteks Foucauldian, dipandang bergeser menjadi isu kekuasaan yang tidak selalu sama dengan otoritas, suatu pergeseran yang kita dapat menyebutnya sebagai bergesernya kekuasaan Parsonian yang sistemik menjadi kekuasaan Foucauldian yang berorientasi pada proses atau dialektika. Warna yang kentara dalam kajian mengenai kekuasaan dialektik ini terdapat antara lain dalam kajian-kajian Anthony Giddens¹⁰, dan Pierre Bourdieu.¹¹

Isyu teori dan praktis. Dalam konteks teori, pikiran-pikiran, bayangan-bayangan dan imej kepatuhan yang secara doktrin disebut *sami'na wa atho'na* adalah suatu yang diproduksi dan direproduksi dalam arena pesantren. Dalam interaksi antara kiai dan santri, antara santri dan santri, simbol-simbol kekuasaan diproduksi, direproduksi, dan dimantapkan dalam pemahaman para santri, sehingga menjadikan masuk akal bagi mereka untuk menghadapi kehidupan.

B. Hubungan Kiai dan Santri Pesantren Jamiahtun

Kiai di PJ tidak hanya dikategorikan sebagai elite agama, tetapi juga sebagai elite pesantren, yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan keagamaan serta berkompeten mewarnai corak dan bentuk kepemimpinan yang ada di pondok pesantren. Dengan karismanya kiai menjadi tempat berkiblat bagi santri dan pendukungnya. Segala kebijakan yang dituangkan dalam kata-kata dijadikan pegangan. Sikap dan tingkah lakunya sehari-hari dijadikan panutan atau referensi. Bahasa-bahasa kiasan yang dilontarkannya menjadi bahan renungan. Posisi yang serba menguntungkan kiai ini membentuk mekanisme kerja pondok pesantren, baik yang berkaitan dengan struktur organisasi kepemimpinan maupun arah perkembangan lembaga pesantren.

⁹ Clifford, Geertz, *Religion of Java*. (Chicago: Glencoe Publications, 1960), pp.63.

¹⁰ Anthony, Giddens, *The Consequences of Modernity*. (Cambridge: Cambridge: Polity Press, 1991), pp. 53.

¹¹ P. Bourdieu, *Outline of Theory of Practice*. Terj. R. Nice. (Cambridge: Cambridge University Press, 1980).pp.43.

Kedudukan kiai di PJ itu, merupakan *patron*, tempat bergantung para santri. Kedudukan santri adalah *client* bagi kiai. Hubungan kiai sebagai patron dengan santri sebagai klien diperkuat oleh sistem nilai yang melembaga, yaitu tradisi *sami'na wa aho'na* (mendengar dan mentaati)¹². Nilai ini di barengi dengan nilai lainnya yang mengatur hubungan antar unsur di pondok pesantren.

C. Situasi Ketika Ceramah di PJ : Hening, Pasrah, Pasif

Kepatuhan dan ketaatan jemaah kepada ulama bukanlah ciri Pesantren Jami'atun semata-mata, melainkan menjadi ciri dasar hubungan antara umat dan pemimpin yang secara tradisional berkembang dalam Islam. Oleh sebab itu, gejala kepatuhan dan ketaatan jamaah majlis taklim – dalam hal ini PJ - bukanlah gejala yang terisolir dari gejala yang lebih umum tadi, ciri yang sama dengan kasus PJ dapat ditemukan juga di beberapa pesantren tradisional di Indonesia. Doktrin agama yang disampaikan kiai tidak boleh diragukan kebenarannya oleh santri karena doktrin tersebut datang langsung dari Tuhan, meski disampaikan melalui perantara yang dipilihNya, yaitu para rasul, ulama, dan kiai. Kepatuhan dan ketaatan kepada kiai adalah cerminan dari kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan.

Apabila kita menemukan para santri PJ yang bersikap patuh, taat, dan menerima saja apa yang disampaikan kiai, maka hal ini karena PJ merupakan bagian dari kebudayaan kelompok pengajian Islam di Indonesia pada umumnya. Sikap demikian itu adalah hasil proses belajar jangka panjang yang oleh Dawan Rahardjo¹³ disebut tradisi belajar pesantren.

¹² Peneliti tidak menggeneralisasi asas *sami'na wa aho'na* ini karena pemahaman mengenai hal ini juga multi-interpretasi. Sebagian ulama yang menggunakan tafsir-tafsir Al-Buchari dan A.R.Muslim, yang banyak dipengaruhi oleh faham mu'tazilah, justru memahami pernyataan ini tidak sama dengan taqlid melainkan menafsirkan hal ini secara dinamik – yakni, “berfikir tepat dan konsisten” (lihat, misalnya, Abubakar Atjeh, *Samudera Tafsir*. Djakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1966, hal 11.). Pengertian dari pernyataan di atas bersifat harafiah dalam penelitian ini karena realitas empirik di lapangan menunjukkannya secara eksplisit.

¹³ Pada tahun 1970-an Dawan rahardjo dkk melakukan penelitian mengenai sejumlah pesantren di Indonesia dan menyimpulkan bahwa santri-kyai adalah hubungan patron-klien. Secara tradisional kyai sebagai pusat kehidupan pesantren menjadi pusat orientasi santri. Hal ini disebabkan bahwa pesantren khususnya pada zaman dahulu didirikan oleh seorang kiai yang menerima murid-murid untuk mengaji padanya secara pribadi, dan para murid tersebut kemudian diajak untuk mengembangkan pesantren tersebut. Pada masa lalu, kita mengenal pesantren yang langsung menggunakan nama kiai seperti Pesantren Kiai Maksum, Pesantren Kiai Al Hamidy, Pesantren Kiai Hasan Alawy, dsb. Pada masa kini, karena penyandang modal pesantren berubah menjadi yayasan yang dimiliki beberapa orang, nama pesantren berubah menjadi nama lain seperti Pesantren Gontor, Pesantren Tebu Ireng, dll.

Dalam pendidikan pesantren para santri diajar untuk mematuhi dan menaati semua doktrin yang diajarkan para kiai. Para penerus rasul adalah para sahabat rasul, ulama, kiai, ustadz, guru agama, dan seterusnya. Ketaatan itu ditafsirkan selaras dengan garis penerusan ajaran agama tersebut. Dengan sanksi agama yang berat, yakni ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak taat dan tidak patuh, maka kisah kepatuhan santri terhadap kata-kata kiai menjadi masuk akal. Ucapan kiai diterima begitu saja, pernyataan “kami mendengar, kami taat” difahami secara harafiah apa adanya. Suasana pembelajaran di PJ menjadi linear, tanpa tanya jawab dan diskusi, yang menjadi pokok persoalan di sini adalah bahwa PJ merupakan forum yang memelihara, memantapkan, dan memperkuat nilai dan sikap tersebut. Pengarahan kepada orientasi dan kegiatan politik menjadi relevan dalam kondisi ini.

Doktrin adalah pusat segala ceramah yang disampaikan kiai di PJ. Doktrin adalah inti pengajian di manapun, sedangkan tafsir adalah upaya menghubungkan doktrin dengan realitas. Kiai mengembangkan tafsir dengan retorikanya agar realitas dapat dijelaskan secara masuk akal, sehingga agama yang abstrak dan tidak nyata dibayangkan menjadi seolah-olah nyata dan operasional dalam kehidupan. Oleh sebab itu, doktrin adalah andalan untuk menyampaikan, memelihara, memantapkan dan memperkuat nilai dan sikap kepatuhan dan ketaatan. “Mendengar, patuh, dan taat” [diterjemahkan dari “sami’na wa atho’na”] adalah doktrin yang dianggap datang langsung dari Allah. Kuatnya faktor kepemimpinan ini jelas dalam tradisi kehidupan Islam, mulai dari tingkat paling dasar yaitu keluarga hingga nasional. Indikator yang paling nyata adalah kepemimpinan dalam organisasi-organisasi yang berdasarkan Islam. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa kuatnya orientasi pemimpin dan anak buah dalam organisasi berdasarkan Islam juga bervariasi, namun pemimpin sebagai tokoh sentral tetap dominan, selonggar apapun struktur organisasi tersebut Peacock¹⁴; Nakamura¹⁵. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila orientasi itu juga kuat dalam konteks hubungan kiai dan santri di pesantren.

¹⁴ James L Peacock , *Purifying the Faith: the Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam*. (California: Cummings Publishing Company,1978).pp..37.

¹⁵ Mitsuo, Nakamura, *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. (Tesis Doktor. Cornell University, 1976).pp.74.

D. PJ dan Proses Politik

PJ tidak hanya organisasi yang secara intrinsik merupakan wadah atau arena pembelajaran dan pementapan pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan agama Islam, tetapi juga merupakan suatu instrumen politik, di mana PJ sebagai suatu kesatuan kolektif juga memiliki fungsi selain dari fungsi agama sebagai doktrin. Sebagai instrumen politik, PJ memiliki posisi yang penting dalam percaturan politik tingkat lokal maupun nasional karena santri PJ - dan juga pesantren tradisional yang lainnya yang beribu-ribu jumlah santrinya itu - adalah suara yang signifikan untuk mendukung perjuangan mencapai kedudukan politik tertentu.

Untuk menjelaskan isu agama sebagai instrumen politik tersebut, perlu diurai lebih dahulu dua ciri PJ yang memungkinkan terjadinya, yakni ciri yang disebut massa apung, dan ciri situasi elit yang mengendalikannya. PJ sebagai instrumen politik, PJ - dan tentu saja pesantren-pesantren tradisional lainnya - tidak hanya menjadi instrumen politik tetapi juga menjadi rebutan di kalangan praktisi politik, khususnya partai-partai politik berbasis Islam yang banyak jumlahnya itu. Massa apung yang maksudkan dalam penelitian ini merujuk sejumlah orang yang memiliki satu orientasi yang sama, yaitu orientasi yang dibentuk oleh sekelompok kecil orang elit agama yang mensosialisasikan, mengendalikan dan mengarahkan mereka demi kepentingan tertentu. Dalam analisa ini, massa apung adalah jemaah yang bukan termasuk elit agama. Dengan kata lain, massa apung adalah subordinat yang dikuasai dan dikendalikan oleh kelompok elit yang supraordinat yang memiliki kebebasan untuk menguasai dan mengendalikan massa jemaah yang banyak itu. Karena tergantungan massa apung pada kelompok elit yang menguasai dan mengendalikannya, maka massa ini akan kehilangan orientasi apabila orang-orang yang mengendalikannya itu tidak lagi memiliki kepentingan atas massa ini, atau telah berubah kepentingannya.

Dalam uraian di bawah ini digambarkan bukti empirik bahwa banyak para santri di Banten dikerahkan untuk mendukung kegiatan politik tertentu seperti pemilihan-pemilihan kepala daerah di berbagai tempat baru-baru ini. Elit pesantren mengorganisasi diri membentuk jaringan-jaringan yang lebih luas untuk kepentingan yang lebih besar pula.

E. PJ dan Peristiwa-peristiwa Politik

Keikutsertaan PJ dalam proses politik antara lain:

1. Sekitar 600 santri di ikutkan acara Musyawarah Daerah PKS di kota Tangerang, Musyawarah dilanjutkan dengan kegiatan “Tabligh Akbar”. Pesta tabligh akbar, yang diikuti oleh peserta yang lainnya.
2. Meramaikan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang melakukan tabligh akbar di Banten. Menurut informasi, menjelang pelaksanaan Pilkada, para calon gubernur/wakil gubernur Banten membangun jejaring bernama poros atau koalisi pemenangan Pilkada Banten sejak era reformasi bergulir. Mereka itu menentukan suksesnya Pilkada. Para pimpinan pesantren diharapkan berperan aktif mensosialisasikan untuk mengajak anggotanya menggunakan hak politiknya dalam pesta demokrasi ini.
3. PJ diikuti dalam acara-acara Golongan Karya. Sejak orde baru hingga sekarang, jika terdapat acara-acara besar berupa pengerahan masa yang dilakukan oleh partai politik golongan karya. Pesantren Jamiahtun juga aktif mengikutkan para santrinya dalam acara tersebut.
4. PJ dan Kampanye Pilkada Bupati Tangerang, Banten. Menjelang Pilkada di Tangerang Banten, panitia tim sukses Bupati Tangerang - Banten It dan Rn juga mendatangi PJ. Hampir seluruh santri PJ ber KTP Tangerang Banten. Mereka beberapa kali mengadakan pengajian yasinan dan zikir bersama, serta menyerahkan bantuan untuk perkembangan pesantren ini. Pasangan It dan Rn didukung oleh partai PAN, dan nampaknya kiai dari PJ juga berpihak pada pasangan calon bupati It dan Rn , sehingga beliau dalam suatu ceramahnya di PJ menganjurkan untuk memilih pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, tidak korupsi dan takut pada Allah. Dari pasangan-pasangan calon bupati yang paling pantas menurut beliau adalah pasangan It dan Rn sehingga kepada seluruh santri PJ diharapkan memilih kedua pasangan itu pada saat pilkada.

Tampaknya pada hari pemilihan hampir seluruh santri PJ ikut berpartisipasi memilih calon bupatinya dan mereka semua memilih sesuai dengan yang dianjurkan oleh kiainya karena prinsip *Sami'na wa atho'na* (kami dengar dan kami taat) itulah, pada hasil akhir yang diperoleh memang pada kenyataannya pasangan It dan Rn memenangkan pilkada untuk wilayah Tangerang Banten.

Menurut pengamat Islam, Bachtiar Effendi¹⁶ Saat ini jumlah penduduk muslim sekitar 86 % dari jumlah keseluruhan rakyat Indonesia. Jumlah tersebut

¹⁶ Bachtiar, Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Indonesia* .(Jakarta: Paramadina, 1998), hal.43..

dapat diklasifikasikan kepada dua bagian, yaitu kelompok Islam ortodok (santri) dan sinkretis. Kelompok Islam ortodok (santri) umumnya terdapat di kalangan pesantren di kawasan pedesaan. Di saat yang sama, wilayah pedesaan di Indonesia masih lebih mendominasi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Isu-isu yang berkembang di wilayah pedesaan lebih banyak di respon dengan melihat “siapa” yang mengatakan bukan “apa” yang dikatakan, disinilah menurutnya, muncul kelompok ulama yang membidangi pertumbuhan pesantren. Jika suatu pendapat dikeluarkan oleh ulama, maka semua pengikutnya akan mematuhi tanpa ada bantahan. Dengan demikian, jarang terjadi proses rasionalisasi, yang ada hanya hubungan emosi antara ulama dan santri serta dengan masyarakat setempat. Sehingga ketika ada agenda politik tertentu, yang pertama kali didekati adalah para ulama setempat. Pesantren-pesantren tradisional yang ada di Indonesia, seperti PJ dalam pandangannya, merupakan kelompok Islam Ortodok, maka ketika terjadi Pilkada, Pilgub, para ulama ini berhasil membawa jemaahnya berpihak ke partai politik atau pejabat yang mendekatinya.

Hal ini berbeda dengan kelompok perkotaan yang jarang memperhatikan “siapa” yang mengatakan, tetapi “apa” dan mengapa sesuatu dikatakan, sehingga diperlukan proses rasionalisasi dan bukan figur sebagaimana yang terjadi di pedesaan, atau pesantren-pesantren tradisional. Untuk memahami “apa” dan “mengapa” tersebut, maka di wilayah perkotaan muncullah gerakan Islam atau kelompok jamaah diskusi Islam. Misalnya kelompok Rohis (Rohani Islam) yang muncul di kampus-kampus pada kalangan mahasiswa.

Politik berperan penting di seluruh negara termasuk di negara-negara Arab maupun Indonesia, terutama dalam menafsirkan dan merekonstruksi penafsiran atas agama, ajaran-ajaran keagamaan atau nilai-nilai moral. Tidak mungkin memisahkan antara agama dan politik dengan segala cara apapun. Agama masih menjadi kartu penting bagi para penguasa politik di tingkat lokal maupun internasional, sehingga banyak partai politik berusaha untuk merapatkan barisannya dengan pesantren-pesantren termasuk PJ untuk kepentingan politiknya. Karena dalam masyarakat mana pun di dunia, pengerahan massa masih penting untuk mempengaruhi lawan-lawan politik¹⁷.

¹⁷ G, Alford, *Politics and Society*. (New York : Macmillan Publishing House, 1998), pp.18.

F. Penutup

Gejala yang menjadi inti analisa dalam tulisan ini, yaitu gejala massa subordinat - yang kemudian disebut massa apung - yang menjadi instrumen politik bagi para elit yang menjadi supraordinatnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, massa apung dalam pengertian penelitian ini adalah merujuk kepada sejumlah orang yang termasuk kedalam suatu kategori yang tidak memiliki orientasi sendiri, kecuali orientasi yang dibentuk oleh sejumlah kecil orang yang mengendalikan dan mengarahkan untuk kepentingan tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, konsep kontestasi kekuasaan liberal yang menjadi inti pemikiran Foucauldian nampaknya lebih bekerja pada konteks aktor-aktor yang memiliki kebebasan memilih, padahal kebebasan tersebut secara relatif tidak terdapat dalam konteks subordinat santri PJ.

Kedua, strategi-strategi dan teknik-teknik instrumental terhadap massa jemaah yang menyentuh asas keyakinan kepada Tuhan dan nabi-nabi, dan yang menempatkan ulama atau kiai sebagai pewaris dan penerus ajaran tersebut memantapkan posisi atau kedudukan santri sebagai subordinat yang patuh dan taat kepada elit supraordinat itu. Konteks ini lebih menggambarkan hubungan struktural patron-klien ketimbang konteks kontestasi kekuasaan Foucauldian.

Ketiga, butir (1) dan (2) ini membuktikan bahwa pendekatan kekuasaan Foucauldian lebih operasional dalam konteks elitis seperti para aktor pemimpin organisasi, tetapi kurang operasional dalam konteks para anggota organisasi -dalam hal ini santri pesantren - yang sesungguhnya tidak bebas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka massa apung ini cepat memiliki kehilangan orientasi apabila orang-orang yang mengendalikannya tidak lagi memiliki kepentingan atas massa ini, atau telah berubah kepentingannya.

Berdasarkan realitas empirik yang berkaitan dengan isu politik agama dalam tulisan ini, maka ada dua hal yang penting : *Pertama*, politik agama adalah konsep yang bekerja pada jaringan elit PJ dan pesantren-pesantren tradisonal lain di lingkungannya, lokal maupun nasional sehingga penjelasan kekuasaan Foucauldian bekerja pada konteks elit tersebut; dan *kedua*, santri PJ pada dasarnya adalah massa subordinat—sebagai obyek— yang tidak terlibat langsung dalam kontestasi kekuasaan dalam konteks Foucauldian. Asas doktrin agama Islam yang mereka ikuti berdasarkan kepatuhan dan ketaatan kepada kiai mengakibatkan massa ini dapat secara leluasa dikendalikan oleh supraordinat elit agama PJ.

DAFTAR PUSTAKA

- Alford, G. 1998. *Politics and Society*. New York : Macmillan Publishing House.
- Atjeh, Abubakar. 1966. *Samudera Tafsir*. Djakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Bohannon, P., M. Glazer eds.1988. *High Points in Anthropology*. New York:Alfred-Knopf
- Bourdieu. P. 1984. *Distinction*. Terj. R. Nice. Cambridge. MA: Harvard University Press.
- . 1980. *Outline of Theory of Practice*. Terj. R. Nice. Cambridge: Cambridge University Press.
- .. 1993. *The Field of Cultural Production*. Oxford Polity Press.
- Balandier. G. 1969. *Political Anthropology*. New York : The Free Press Publication.
- Denzin,N., & Y. Lincoln. 2000. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California : Sage Publications.
- Dieter Evers, Hans. 1982. “Produksi Subsistensi dan “Masa Apung” Jakarta dalam *Masalah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Penyt.Koentjaraningrat. Jakarta: LP3ES.
- Ember, Carol R., & Melvin Ember. 1973. *Cultural Anthropology*. New York: Appleton-Century Crofts.
- Effendy, Bachtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Indonesia* Jakarta: Paramadina.
- Foucault,M. 1978. *Power/Knowledge: Selected Interview and Other Writings 1972 - 1977*. Terj. C. Gordon. New York: Pantheon.
- Giddens, Anthony. 1991. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Cambridge: Polity Press.
- .. 1987. *The Social Theories Today*. Cambridge : Cambridge University Press.
- .. 1984. *The Constitutions of Society*. Berkeley, University of California Press. 1984
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture: Selected Essays*. New York: Basic Books.

- . 1960. *Religion of Java*. Chicago: Glencoe Publications.
- . 1966. "Religion as a Cultural System," *Anthropological Approaches to the Study of Religion*. (M.Banton, ed.). ASA Monogra London : Tavistock., pp.1-40.
- Idries, Iskandar. 1969. *Tafsier Muchtasor*. Jilid I, Lembaga Penerbitan Departemen Agama RI.
- Johnson, M. 1992 *Selecting Informant in Qualitative Research*. Thousand
- Laslett, W. 1984. *Religion and Politics*. Chicago : University of Chicago Press.
- Mc Glynn, F. & A. Tuden, ed., (1992). *Anthropological Approaches and Political Behavior*. Pitsburg: University of Pittsburgh.
- Nakamura, Mitsuo. 1976. *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. Tesis Doktor. Cornell University.
- Peacock, James L. 1978. *Purifying the Faith: the Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam*. California: Cummings Publishing Company.
- Robertson, Roland. 1990. *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi* (Terjemahan A.F.Saifuddin). Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sukanto. 1999. *Kepemimpinan Kiai dalam pesantren*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sunarto,Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, 2003. Jakarta:Fak.Ekonomi Universitas Indonesia.
- Turner,V.W., & M. Swartz, A. Tuden. eds.,1966. *Political Anthropology*. Chicago: Aldine.
- Turner, V.W. 1962. *The Ritual Process*. Chicago: Aldine Publishing.
- Vincent, J.L. 1990. *Political Anthropology. Visions and Approaches*. New York : Columbia University Press.